

Belanja Tak Terduga- Pj Sekda Sulsel Lepas Bantuan Kemanusiaan OPD untuk Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor



Sumber gambar:

<https://sulselprov.go.id/post/pj-sekda-sulsel-lepas-bantuan-kemanusiaan-opd-untuk-korban-bencana-banjir-dan-tanah-longsor>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam yang akan diserahkan ke Posko Induk di Kabupaten Luwu. Bantuan tersebut dilepas langsung Penjabat Sekertaris Daerah Andi Muhammad Arsjad, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 10 Mei 2024.

Andi Arsjad mengatakan, bantuan ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disalurkan langsung ke daerah-daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor melalui Posko Induk di Kabupaten Luwu.

"Hari ini kita sama-sama melepas bantuan kemanusiaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bantuan ini Insya Allah akan disalurkan kepada daerah-daerah yang terdampak," ucapnya.

Jenis bantuan yang dikirim, katanya, berupa dana yang dikumpulkan selama dua hari dengan total dana yang terkumpul sebanyak Rp289 juta lebih, dan juga bantuan lainnya. Seperti bahan makanan, minuman, pakaian layak pakai, kebutuhan bayi, obat-obatan, kebutuhan wanita, dan kebutuhan lainnya.

Andi Arsjad menjelaskan, sebagian bantuan sudah diserahkan ke Posko Induk dan juga sudah disalurkan lebih awal. Sehingga bantuan kali ini akan semakin memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk para korban terdampak bencana.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Tentu kita berharap ini menjadi suatu bentuk kepedulian yang tentu meringankan para korban bencana alam di daerah-daerah terdampak," jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan, Devo Khadafi, menjelaskan, bantuan kemanusiaan OPD yang akan dikirim ke Posko Induk berupa bantuan dana dan bantuan logistik.

Untuk bantuan dana, kata Devo, total dana yang akan disalurkan melalui Posko Induk sebanyak Rp289 juta lebih yang terkumpul dari OPD Pemprov Sulsel, sementara bantuan logistik yang akan dikirim, diantaranya berupa makanan, obat-obatan, kebutuhan bayi, kebutuhan wanita, terpal, karpet plastik, kebutuhan mandi, dan kebutuhan lainnya.

"Selain bantuan dana yang terkumpul sebanyak Rp289 juta terdapat bantuan barang berupa beras, sembako, susu, peralatan untuk bayi, air mineral, terpal, karpet plastik, sikat gigi, sabun mandi, sabun cuci. Ini banyak sekali yang terkumpul yang kalau dirupiahkan kira-kira bisa mencapai Rp1 miliar," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Devo juga melaporkan kondisi terakhir di lokasi bencana. Dimana sejumlah akses ke desa-desa terisolir sudah mulai terbuka, namun kondisi cuaca dengan masih seringnya turun hujan, masih mengakibatkan longsor-longsor kecil di beberapa tempat.

Untuk itu, Ia berharap dengan koordinasi dan kerjasama stakeholder yang ada dalam upaya penanganan, terutama dalam membantu pemulihan kondisi pasca bencana di daerah-daerah terdampak, bisa tertangani dengan cepat. (*)

Adapun dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyampaikan total produksi beras diprediksi turun sebesar 45,74 ribu ton atau sekitar 1,63% dibandingkan 2023 lalu. Kondisi ini dipicu cuaca ekstrem yang diiringi bencana alam melanda sejumlah wilayah Sulsel pada awal 2024.

"Secara total diperkirakan terjadi penurunan total jumlah produksi beras kita turun sebesar 1,63%," ujar Kepala BPS Sulsel Aryanto dalam pemaparannya dikutip, Kamis (7/11/2024).

Aryanto mengungkapkan, curah hujan tinggi disertai banjir dan tanah longsor menyebabkan banyak sawah mengalami puso atau gagal panen. Hal itu berdampak pada penurunan luas panen yang selaras penurunan produksi padi dan beras.

"Perlu diketahui dan perlu juga diingat bahwa memang di awal tahun 2024 terjadi longsor dan banjir ada di mana-mana sehingga terjadi banyak yang puso, luas panennya untuk tahun 2024 di subround I (Januari-April) cukup dalam (penurunannya)," katanya.

BPS Sulsel mencatat, total luas panen padi 2024 diperkirakan mencapai 949,78 ribu hektare atau mengalami penurunan sebesar 18,01 ribu hektare atau 1,86% dibanding 2023. Luas panen subround I 2024 mengalami penurunan sebesar 89,50 ribu hektare diikuti kenaikan di subround II (Mei-Agustus) dan juga potensi kenaikan di subround III (September-Desember) sebesar 61,45 ribu hektare dan 10,04 ribu hektare.

Sementara total produksi padi padi 2024 diperkirakan mencapai 4,80 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 79,71 ribu ton atau 1,63% dibanding 2023. Produksi padi subround I 2024

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

mengalami penurunan sebesar 448,20 ribu ton diikuti kenaikan di subround II dan juga potensi kenaikan di subround III sebesar 271,95 ribu ton dan 96,55 ribu ton.

"Nah, kalau kita lihat produksi padinya juga sama dengan apa yang terjadi pada luas panen. Di subround I turun 27,52%, untuk subround II naik 16,75% dan subround III naik 5,94%. Secara total diperkirakan terjadi penurunan sebesar 1,63%," beber Aryanto.

Di satu sisi, total produksi beras padi 2024 diperkirakan mencapai 2,75 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 45,74 ribu ton atau 1,63% dibanding 2023. Produksi beras subround I (Januari-April) 2024 mengalami penurunan sebesar 257,19 ribu ton diikuti kenaikan di subround II dan juga potensi kenaikan di subround III sebesar 156,05 ribu ton dan 55,40 ribu ton.

"Dari produksi padi kita bisa konversikan menjadi produksi beras. Dengan konversi yang sudah dilakukan penghitungannya, maka juga memiliki pola yang sama. Sekitar 27,52% terjadi penurunan di subround I. Di subround II naik 16,75% dan di subround III naik 5,94%," urainya.

Kendati demikian, Aryanto menekankan bahwa prediksi penurunan luas panen serta produksi padi dan beras 2024 merupakan angka sementara. Sebab, untuk Oktober, November, Desember adalah angka potensi.

"Ini merupakan angka sementara karena untuk bulan Oktober, November, Desember adalah angka potensi," ucap Aryanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Imran Jauzi membeberkan pihaknya telah mempunyai beberapa langkah mengantisipasi potensi penurunan produksi beras. Salah satunya percepatan penanaman padi melalui bantuan pompa dari Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jadi, memangantisipasi kita, pertama, ada percepatan areal penanaman padi. Bagaimana caranya? Kita mengeluarkan bantuan perpompaan dari Kementerian Pertanian. Kalau pompa-pompa ini semuanya bisa berfungsi semuanya, insyaallah ini bisa membantu percepatan," tuturnya.

Selain itu, lanjut Imran, optimalisasi lahan rawa untuk mendukung produksi padi. Pemerintah daerah juga mendorong petani agar segera menanam setelah panen tanpa menunggu waktu terlalu lama guna mempercepat siklus panen berikutnya.

"Kedua, optimalisasi lahan rawa. Itu lahan rawa 13.648 hektare itu sudah mulai juga menanam terus, panen. Jadi, ada proses percepatan kita menanam. Biasanya, kan, orang setelah panen menunggu dulu sampai biasa satu bulan. Ini sekarang tidak, 14 hari kita minta mereka supaya langsung tanam," jelasnya.

Imran mengakui penurunan luas panen akan berdampak pada produksi padi dan beras. Namun, dengan berbagai upaya yang dilakukan diharapkan penurunan produksi tidak signifikan.

"Kalaupun berkurang saya kira wajar. Tapi, kan, nanti akan di-*carry over* dengan panen yang kita tambah, toh," terangnya.

Adapun dalam hal ini, Sedikitnya 15 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya diungsikan akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan, pada Jumat (03/05). Pakar kebencanaan menilai pemerintah daerah dan pusat belum menyentuh mitigasi risiko sehingga jatuhnya korban akibat bencana alam bisa dihindari.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 14 orang meninggal dunia di Kabupaten Luwu akibat tertimbun longsor dan terseret banjir. Adapun satu orang lainnya meninggal dunia di Kabupaten Sidenreng Rappang atau lazim disebut Sidrap.

Selain Kabupaten Luwu dan Sidrap, bencana banjir telah melanda Kabupaten Wajo, Sinjai, Enrekang, Pinrang, dan Soppeng.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel melaporkan bahwa Luwu adalah kabupaten yang paling parah terparah banjir. Terdapat 13 kecamatan di kabupaten itu yang terendam banjir.

Hingga Sabtu (4/5) pukul 09.00 WIB, sebanyak 2.052 kepala keluarga terdampak dan 115 jiwa di Kabupaten Luwu mengungsi di beberapa masjid dan rumah kerabat.

Artikel-artikel yang direkomendasikan

Akhir dari Artikel-artikel yang direkomendasikan

“Kerugian materil terdata kaji cepat antara lain sebanyak 1.943 unit rumah terdampak, 109 unit rumah rusak berat, 42 unit rumah hanyut, empat titik ruas jalan terdampak, satu unit jembatan terdampak, 14 unit kendaraan roda dua dan empat terdampak, serta lahan persawahan dan perkebunan warga terdampak,” sebut keterangan BNPB dan BPBD Sulsel.

Basarnas Sulsel mengatakan telah mengerahkan puluhan personel dari Kota Makassar dan daerah lain ke sejumlah lokasi bencana.

Warga ‘takut’ bencana susulan

Takdir (38) warga di Desa Kasibiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, mengaku "ketakutan" pada ancaman banjir susulan.

Menurut Takdir, warga di desanya mulai waspada karena ada titik longsor di pegunungan dekat desa.

"Kita tetap waspada karena di wilayah pegunungan ada beberapa titik longsor. Jangan sampai tiba-tiba datang air bah," paparnya kepada wartawan Darul Amri yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Keterangan gambar, Foto udara suasana permukiman yang terdampak banjir di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Sabtu (4/5/2024).

Takdir menyebut sanak saudaranya yang tinggal di Desa Malela Suli sudah mengungsi sejak siang hingga malam. Ada yang ke rumah keluarga terdekat atau masjid terdekat.

"Sudah banyak yang dievakuasi. Kendaraan tidak bisa masuk, biar motor trail susah tembus karena jalan itu lumpur sampai di atas lutut," kata Takdir.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

BMKG keluarkan tanda siaga bencana selama tiga hari di Sulsel

Kekhawatiran Takdir cukup beralasan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wil. IV Makassar telah mengeluarkan tanda siaga selama tiga hari ke depan untuk wilayah bencana.

Prakirawan BMKG IV Makassar, Amhar Ulfiana, menyebutkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah.

"Untuk hari ini kami masih berikan peringatan siaga, di atas waspada. Ada tiga tingkatan: waspada, siaga, kemudian awas," jelasnya.

Peringatan siaga diberikan karena intensitas hujan diperkirakan masih lebat hingga sangat lebat.

"Seperti banjir dan tanah longsor kami tetap kasih siaga untuk besok dan lusa," tambah Amhar.

Pemprov Sulsel dikritik tidak menyentuh mitigasi risiko

Ketua Research Institute of Disaster Engineering Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Ardy Arsyad, menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih berfokus pada sektor hilir, yaitu evakuasi.

"Nanti terjadi longsor baru turun ramai-ramai bikin gawat darurat, *emergency*, evakuasi, rehabilitasi. Tapi ada yang kurang, menurut saya, mitigasi risiko (atau) manajemen resiko. Itu tidak tersentuh dari semua pihak," ungkap Ardy Arsyad.

Menurut Ardy, seharusnya pemerintah melakukan pencegahan, salah satunya pendataan daerah-daerah yang rawan bencana.

"Masalahnya sekarang ada daerah yang rawan longsor tapi terlalu regional, tidak detail. Misalnya dikatakan Toraja Utara itu rawan longsor, tapi masyarakat itu mau tahu di mana saja daerah rawan, kalau bisa tingkat RT dan RW," tegasnya.

Selain harus mempunyai data, Pemprov Sulsel perlu membuat peta risiko, kata Ardy. Apalagi, tambahnya, rata-rata daerah yang risiko bencananya cukup tinggi memiliki kontur tanah yang labil, ditambah adanya pembukaan lahan dan perubahan iklim.

"Jadi usulan saya pemerintah ini harus membuat buku manual atau buku saku bagi masyarakat yang hidup di daerah lereng, dan itu disosialisasikan. Bukunya seputar bagaimana mengolah lahan di daerah lereng-lereng. Kan tidak mungkin disuruh mereka pindah padahal mereka sudah memiliki lahan itu," jelas Ardy.

Keterangan gambar, Selain Kabupaten Luwu dan Sidrap, bencana banjir telah melanda Kabupaten Wajo, Sinjai, Enrekang, Pinrang, dan Soppeng.

Berdasarkan data BPBD Sulsel, terdapat 43 orang meninggal dunia akibat bencana alam sepanjang 2024 di Sulawesi Selatan.

Selain akibat banjir di Luwu dan Sidrap pada Mei 2024, puluhan orang tewas akibat [tanah longsor di Tana Toraja pada pertengahan April lalu](#).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

‘Kalau bicara mitigasi, semua unsur ikut terlibat’

Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, mengatakan mitigasi risiko seharusnya tidak hanya ditujukan ke BPBD tapi juga ke berbagai instansi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak Balai Sungai.

"Itu kan kerusakan lingkungan bukan di [ranah] BPBD tetapi ada di kementerian terkait, seperti di lingkungan hidup kehutanan. Kalau banjir itu kaitannya dengan balai sungai. Jadi kalau bicara mitigasi semua unsur ikut terlibat," ujar Amson Padolo.

Kata Amson, pihaknya sudah menyampaikan soal persoalan mitigasi bencana ini ke Menteri Koordinator PMK agar semua instansi terkait digerakkan.

"Hampir beberapa provinsi juga seperti begini, jadi kita berharap ada kesatuan yang dikoordinir oleh bapak menko agar melibatkan semua unit-unit dalam hal penanganan mitigasi," sambung Amson.

Sebelumnya, setelah [bencana tanah longsor terjadi di Tana Toraja, pertengahan April lalu](#), Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa semua peralatan untuk deteksi dini bencana tanah longsor - mulai dari indikasi kawasan rawan hingga peringatan cuaca - sudah difasilitasi bagi pemerintah daerah. Sehingga, seharusnya bencana yang menelan jiwa bisa dihindari.

“Jadi penanggulangan bencana ini, ujung tombaknya pemerintah daerah. Sekarang informasi apa lagi yang diperlukan? Peta daerah sudah ada, peta risikonya sudah ada. Terus sekarang, prakiraan cuaca BMKG alatnya sudah ada di situ.

“Teknologi praktisnya untuk melihat gejala alam sudah kami ajarkan. Proses belajar ini juga harus kita dorong ke pemerintah daerah,” tegas Abdul.

Sumber Berita:

1. <https://sulselprov.go.id/post/pj-sekda-sulsel-lepas-bantuan-kemanusiaan-opd-untuk-korban-bencana-banjir-dan-tanah-longsor>
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7627454/produksi-beras-di-sulsel-diprediksi-turun-45-47-ribu-ton-imbis-bencana-alam>
3. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cge8zk9w4v7o>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 yang menyatakan:

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 yang menyatakan:

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang• undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 52 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT

kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
- 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

1. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.